

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 2003. Salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar yaitu pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah itu ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dibuat karena sebelumnya pengelolaan keuangan negara menerapkan sistem pencatatan *single entry*, yaitu pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (Halim dalam Tanjung, 2013:2).

Selama sistem pencatatan *single entry*, pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang meliputi informasi mengenai jumlah aset, kewajiban serta ekuitas. Dengan diterapkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan secara lengkap karena sistem pencatatan dilakukan dengan *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* adalah suatu transaksi ekonomi akan dicatat pada sisi debit dan sisi.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mendasar bagi entitas organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan, baik dalam lingkup organisasi privat maupun organisasi publik. Transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola serta pelaksanaan kebijakan yang terpercaya kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain dalam melakukan operasionalnya. Oleh karena itu, masyarakat, kreditur, donator, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mempunyai hak untuk mengetahui sumber dana yang dikelola melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang ada di dalam laporan keuangan neraca. Penyusunan dan penyajian aset tetap di neraca harus berdasarkan SAP sehingga aset tetap yang disajikan tidak *overstate*. Pemerintah daerah sering mengalami kendala dalam mengelola aset karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), penghapusan, bahkan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin ada yang digelapkan. Menurut Keiso dan Weygandt dalam Halim (2012:305) pada hakikatnya terdapat sedikitnya tiga masalah utama yang kemungkinan terjadi dalam akuntansi aset tetap, meliputi perolehan (*acquitition*), pemakaian (*utilization*), dan penarikan (penghapusan) dari peredaran karena masa manfaat berakhir.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang yang selanjutnya disebut BPBPK adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi dan menyelamatkan korban kebakaran dan/atau korban bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata. Dalam menjalankan tugas utamanya, BPBPK sangat bergantung kepada mobil pemadam kebakaran yang merupakan salah satu aset tetap yang dimiliki. Pada tahun 2014 telah terjadi 276 kali kebakaran di Kota Palembang

(<http://sumsel.tribunnews.com/2015/03/02/dinas-kebakaran-palembang-rayakan-hut-ke-96> diakses 23 Maret 2015), sehingga aset tetap BPBPK menjadi hal yang terpenting dalam menjalankan kegiatannya. Laporan wartawan Tribun Sumsel online, menyatakan bahwa saat ini mobil pemadam kebakaran Kota Palembang sebanyak 16 unit (<http://sumsel.tribunnews.com/2015/03/02/dinas-kebakaran-palembang-rayakan-hut-ke-96> diakses 23 Maret 2015). Pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut bersumber dari dana APBD, begitu pula dengan aset tetap lainnya yang mendukung operasional pemerintahan, sehingga sebagai pengguna anggaran, BPBPK harus menyusun dan membuat laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan dengan entitas pelaporan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan SAP sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat terpenuhi, termasuk mengenai aset tetap mulai saat perolehan hingga penyajian di dalam neraca.

Laporan keuangan pemerintah Kota Palembang pada tahun 2014 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan (LAKIP, 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penilaian tertinggi yang diberikan auditor bahwa secara material penyajian laporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan Buletin Teknis (Bultek). Namun, aset tetap peralatan dan mesin di BPBPK masih banyak yang belum terinventaris dengan baik disebabkan oleh sistem pencatatan sebelumnya sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan keuangan. Padahal aset BPBPK sangat didominasi oleh aset tetap, terutama aset tetap peralatan dan mesin. Aset tetap ini melebihi setengah dari total aset yaitu mencapai 62,55% pada tahun 2012, 63,21% pada tahun 2013, dan 66,87% pada tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelaah tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan SAP. Sebagai penulisan laporan akhir, penulis mengangkat judul **“Analisis Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang, maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan laporan akhir nantinya lebih terarah dan tidak menyimpang dari konteks permasalahan, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada penerapan akuntansi aset tetap (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) mengenai peralatan dan mesin di BPBPK Kota Palembang tahun 2012-2014. Penerapan akuntansi aset tetap didasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Memberikan masukan dan sumbang pikir kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang khususnya Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan terutama dalam perlakuan aset tetap peralatan dan mesin.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penulis-penulis berikutnya dalam kegiatan dibidang yang sama.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 193) terdapat dua macam sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen atau data yang sudah dipublikasi.

Menurut Noor (2011: 138-141) ada lima macam metode pengumpulan data berdasarkan tekniknya yaitu:

1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.
2. Kuesioner/Angket
Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
3. Pengamatan (*Observasi*)
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kegiatan atau peristiwa, waktu, dan perasaan.
4. Dokumen
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu.
5. *Focus Group Discussion* (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis memerlukan data yang andal, relevan dan akurat agar dapat menganalisa instansi terkait. Data tersebut menjadi alat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Penulis menggunakan sumber data sekunder seperti data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, buku, dan literatur-literatur lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori sebagai acuan dalam penulisan laporan akhir ini yaitu pengertian akuntansi pemerintahan, tujuan dan karakteristik akuntansi pemerintah, entitas akuntansi dan pelaporan, lingkungan akuntansi pemerintah, pengertian aset tetap, pengakuan, pengukuran dan pertukaran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan, pengungkapan aset tetap.

Bab III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, mengenai sejarah singkat instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas, dan penerapan aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan data tahun 2012-2014.

Bab IV PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan tentang pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu penerapan akuntansi aset tetap (pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan) mengenai peralatan dan mesin di BPBPK Kota Palembang berdasarkan data tahun 2012-2014.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis memberikan suatu simpulan dari penyelesaian permasalahan yang ada dalam instansi terkait, serta memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk instansi terkait.